

Hariadi Kartodihardjo
Editor

KEMBALI KE JALAN LURUS

Kritik Penggunaan Ilmu
dan Praktek Kehutanan
Indonesia

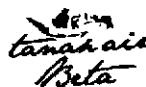

DEVELOPMENT
Center for Human Development Capacity and Institutional Development
Faculty of Forestry Bogor Agricultural University

*tanah air
Beta*

Kembali Ke Jalan Lurus

Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia

Diterbitkan Oleh



Kembali Ke Jalan Lurus

Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia

Editor: Hariadi Kartodihardjo

Penulis: Azis Khan, Branasto Nugroho, Didik Suharjito, Ddung Darusman, Ervizal A M vZuhud, Hardjanto, Hariadi Kartodihardjo, Hendrayanto, Mohamad Shohibuddin, Mustofa Agung Sardjono, Myrna A Safitri, San Afri Awang, Sofyan P Warsito, Soeryo Adiwibowo, Sudarsono Soedomo, Sulistya Ekawati.

Diterbitkan Oleh



Perpustakaan Nasional, Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Kembali Kejalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia, 2013
Khan, Azis, Bramasto Nugroho, Didik Suharjito, Dudung Darusman, Ervival A M Zuhud,
Hardjanto, Hariadi Kartodihardjo, Hendrayanto, Mohamad Shohibuddin, Mustofa Agung
Sardjono, Myrna A Safitri, San Afri Awang, Sofyan P Warsito, Soeryo Adiwibowo, Sudarsono
Soedomo, Sulistya Ekawati

ISBN: 978-979-9337-52-8

XIV+ 504 Halaman, 16 x 24 cm

Cetakan Pertama, Januari 2013,
Editor: Hariadi Kartodihardjo
Editor Bahasa: Handyan A Putro,
Mohammad Sidiq
Rancang Sampul: Kurnianto
Tata Letak: Sugeng Riyadi

Diterbitkan pertama kali oleh:
FORCI DEVELOPMENT
Bekerja sama Dengan
Tanah Air Beta
Gedung Amal Insani, No 04
Lantai 3, Maguwoharjo, Sleman Yogyakarta
Telp (0274) 7422761

Dicetak Oleh:
Nailil Printika
Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Gagasan Pembuatan Buku dan Situasi Pendorongnya

Lebih dari satu tahun yang lalu, tepatnya Juni 2011, gagasan pembuatan buku ini dicanangkan. Gagasan tersebut ditumbuhkan terutama dari akumulasi adanya persoalan-persoalan pengelolaan sumberdaya alam, khususnya hutan. Setelah memahami persoalan-persoalan itu bukan langsung menyampaikan pendapat kepada pembuat kebijakan atau kegiatan semacamnya—yang biasanya telah dilakukan, melainkan didahului dengan mempertanyakan kepada diri sendiri, apakah ada kesalahan ilmu pengetahuan atau kesalahan menggunakan ilmu pengetahuan itu dalam praktek-praktek kehutanan ?

Pertanyaan seperti itu didorong oleh suatu kenyataan bahwa perubahan-perubahan yang terlihat, termasuk perubahan Undang-undang Kehutanan, tidak mengubah secara signifikan tataran praktis seperti yang dikehendaki. Dengan bahasa lain, adanya perubahan struktur ternyata tidak disertai perubahan perilaku, sehingga kinerjanya tidak signifikan menjadi lebih baik. Format pemikiran dalam konsep kelembagaan S-B-P yaitu struktur (*Structure*) mempengaruhi perilaku (*Behavior*) dan perilaku mempengaruhi kinerja (*performance*) tidak berjalan. Untuk menjawab mengapa demikian, tentu tidak mudah, atau setidaknya-tidaknya memerlukan konfirmasi banyak teman. Itulah gagasan pembuatan buku ini.

Pemikiran yang Mempengaruhi

Menyampaikan gagasan penyusunan buku ini kepada teman dan sahabat calon penulis pada mulanya penuh keraguan. Apakah benar teman-teman tertarik untuk bersama-sama menulis buku atau tulisan yang sudah dimikilinya rela diberikan menjadi bagian dari buku ini. Hal itu disebabkan terutama buku ini bukan untuk menjawab pertanyaan praktis masalah-masalah kehutanan, melainkan menjawab pertanyaan umum yang terkesan sebagai pertanyaan akademis: Apakah mungkin dengan cara penggunaan ilmu dan praktek kehutanan saat ini, keberlangsungan kehutanan itu akan terwujud? Cara penggunaan ilmu pengetahuan dianggap menjadi titik kritis, karena perubahan tindakan secara mendasar hampir mustahil dapat dilakukan tanpa perubahan cara berfikir.

Mungkin apabila tidak disertai suatu tinjauan yang berbeda, pertanyaan seperti itu tidak akan ada. Hal ini disebabkan oleh suatu anggapan umum bahwa peran dan penggunaan ilmu pengetahuan itu sudah demikian adanya, sudah *given*. Sehingga ketidak-sesuaian kinerja kehutanan dengan harapan dianggap sebagai masalah praktek kehutanan dan bukan masalah penggunaan ilmu pengetahuan.

Bukan baru saat ini, namun sudah sekitar 20 tahun yang lalu, pemikiran-pemikiran sosial dan lingkungan hidup sudah mewarnai arah kebijakan kehutanan, namun pemikiran-pemikiran itu berpengaruh baru sebatas menjadi tambahan kegiatan-kegiatan dan belum menuju rekonstruksi pembaharuan kerangka pikir yang diharapkan. Dengan mengamati perkembangan di wilayah-wilayah pinggiran penggunaan ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu non-*mainstream* khususnya bagi pendidikan dan penelitian kehutanan, seperti kelembagaan, politik, antropologi, sosiologi, hukum transformatif, termasuk teori-teori sosial kritis serta bidang-bidang “campuran” seperti ekonomi politik dan ekologi politik, pada kalangan yang masih terbatas, telah membuka perdebatan baru tentang kecukupan penggunaan ilmu-ilmu yang berbasis ke-alam-an yang digunakan dunia kehutanan saat ini, untuk mampu memecahkan persoalan riil pembangunan.

Isi Buku

Tiga bagian yang dipaparkan di dalam buku, belum dapat dikatakan sebagai mencukupi isi buku ini sesuai tujuannya. Sifatnya masih

eksploratif dan indikatif, setidaknya mengukur apakah kerangka pemikiran dan tinjauan atas masalah-masalah yang diuraikan dalam buku ini cukup kuat untuk menjadi jawaban atas persoalan penggunaan ilmu pengetahuan dan praktek kehutanan Indonesia.

Bagian pertama dengan penulis Myrna A Saftri, Hardjanto, Sudarsono Sodomomo, Sanafri Awang dan Azis Khan mengeksplorasi berbagai fakta dan memberikan ide-ide tentang artikulasi ulang mengenai pemaknaan terhadap hutan, hukum dan masyarakat berdasarkan pendekatan transdisiplin dalam studi sosio-legal; masalah-masalah mendasar penggunaan ilmu kehutanan dan revolusinya; kritik terhadap *scientific forestry*¹ yang dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan pelepasan kawasan, hutan tanaman, tata niaga kayu, sistem verifikasi legalitas kayu, ekspor kayu dan industri pulp; keadilan dan pendidikan kehutanan dengan kerangka ilmu kehutanan dan ekonomi politik neoliberalisme serta rekonstruksi ilmu kehutanan; telaah pemikiran mendasar atau diskursus dan hegemoni kekuasaan yang dibangkitkan dari diskursus itu, yang berpengaruh terhadap bentuk-bentuk kebijakan yang dilahirkan.

Meskipun dapat dibuktikan bahwa penggunaan ilmu pengetahuan kehutanan saat ini sangat lemah untuk dapat memecahkan masalah kehutanan, dalam bagian ini diuraikan mengapa kritik penggunaan ilmu pengetahuan yang mendasari berbagai definisi dan pengaturan kehutanan itu lemah. Penyebab yang terungkap, misalnya bahwa ilmu itu dianggap netral. Sementara itu bagi pengguna ilmu pengetahuan dan dapat mempertahankan dominasi ekonomi maupun politik berdasarkan praktek ilmu pengetahuan itu cenderung akan mempertahankannya. Dalam banyak hal lain, ilmu pengetahuan itu dianggap identik dengan lembaga pendidikan tinggi dimana para profesional dilahirkan, dan oleh karenanya mereka enggan mengkritisi "rumahnya" sendiri. Alasan lainnya, dengan penguasaan ilmu pengetahuan secara spesifik dan terbatas, cenderung akan menutup diri terhadap pengetahuan lainnya, dan akibatnya pengetahuan sendiri dianggap lebih benar dan enggan untuk mengkritisinya.

1 *Scientific forestry* merupakan paradigma ilmu, kebijakan dan industri kehutanan yang berkembang pada abad ke-19, dengan muasal yang marak di Jerman. Secara ringkas paradigma ini ingin memisahkan hutan dari kehidupan masyarakat setempat, dari ekonomi pedesaan dan menjadikan kekayaan hutan sebagai alat memenuhi kebutuhan industrial yang disokong dan digerakkan negara (Lang dan Pye, 2001:26)

Bagian kedua dari buku ini mengeksplorasi peran ilmu institusi/kelembagaan dan ilmu politik dalam mengupas proses pembuatan kebijakan, meletakkan masalah institusi dan tata pemerintahan sebagai pusat perhatian yang memungkinkan terwujudnya pengelolaan hutan lestari, menelaah konsep institusi berdasarkan teori permainan (*game theory*), menelaah ekologi politik dalam pengelolaan hutan berbasis komunitas, serta penerapan ilmu insitusi dan ilmu politik dalam menelaah pembuatan dan pelaksanaan kebijakan desentralisasi kehutanan.

Bagian kedua yang ditulis oleh Hariadi Kartodihardjo, Bramasto Nugroho, Sudarsono Soedomo, Soeyo Adiwibowo, Mohamad Shohibuddin dan Sulistya Ekawati ini memaparkan bagaimana perluasan ilmu kehutanan dikembangkan dengan mengadopsi berbagai konsep/teori yang selama ini cenderung tidak digunakan, serta implikasi perluasan ilmu kehutanan itu bagi, baik pembuatan maupun implementasi kebijakan.

Secara operasional, dengan memperluas ilmu kehutanan—dalam hal ini ilmu kelembagaan dan ekologi politik, dengan metoda-metodanya seperti aksi bersama, permainan, diskursus, jaringan, dan lain-lain—sebagai cara pandang baru untuk menelaah masalah-masalah kehutanan dan pemerintahan, akan diperoleh pembaruan cara kerja, karena perbedaan masalah yang dihadapi. Klaim yang diajukan disini bahwa dengan memperluas ilmu kehutanan, masalah kehutanan dapat didefinisikan lebih tepat, sedangkan sebelum itu, bisa jadi salah dalam mendefinisikan masalah. Maka mudah diduga, kebijakan yang diterapkan untuk masalah yang salah tidak akan punya makna dalam memperbaiki keadaan.

Bukan hanya itu, perluasan ilmu pengetahuan tersebut juga dapat mewujudkan kesadaran betapa penjajahan fisik yang sudah lewat masanya itu, kini digantikan oleh penjajahan kerangka berfikir melalui ilmu pengetahuan, yangmana media (sosial), kebijakan internasional, buku-buku populer dan lain-lain sebagai alat komunikasinya. Ilmu pengetahuan itu adalah sumber sekaligus kekuasaan itu sendiri yang dalam prakteknya membentuk kelompok-kelompok pendukungnya (*epistemic community*). Maka dibalik kebijakan publik (internasional, nasional) yang didukung ilmu pengetahuan dapat terkandung hegemoni kekuasaan atas kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya. Disamping itu, perluasan penggunaan ilmu kehutanan sekaligus dapat menggeser pandangan terhadap fakta kehutanan yang selama ini cenderung hanya dianggap sebagai fakta hukum dan administrasi.

Bagian ketiga buku ini ditulis oleh Sofyan Warsito, Ervival AM. Zuhud, Mustofa Agung Sarjono, Didik Suharjito dan Hendrayanto. Pada bagian ini kita diminta untuk menggunakan segenap pengetahuan untuk mencermati sumberdaya hutan, yang mempunyai karakteristik tertentu, baik apabila dipandang sebagai modal ekonomi, modal sosial maupun modal ekologi. Tanpa harus memperhatikan kelemahan kebijakan kehutanan akibat terbatasnya pengetahuan yang digunakan untuk mendefinisikan dan menetapkan kebijakan kehutanan, ketidaktercermatan dalam menafsirkan, misalnya cara menentukan kriteria kelestarian hutan—apakah berdasarkan kelestarian produksi atau tegakan, akan melahirkan kebijakan-kebijakan keliru. Kesalahan dalam menentukan batasan produksi (AAC) misalnya, telah menjadi bagian dari tragedi kerusakan hutan alam produksi selama ini, dan hal demikian itu disebabkan oleh kesalahan memaknai pelajaran dasar ilmu kehutanan tentang penetapan produksi lestari. Kekeliruan yang sifatnya paling elementer seperti itu tentunya mudah diduga jikalau mudah menular pada persoalan-persoalan yang lebih pelik, misalnya mengkaitkan karakteristik hutan, yaitu adanya stimulus-stimulus alami dari berbagai sifat biologi flora dan fauna, yang perlu difahami dan diperhatikan dalam pengelolannya.

Sifat mengutamakan hutan secara bio-fisik itu juga melahirkan persoalan-persoalan sosial yang dalam hal ini dibuktikan oleh adanya hambatan perkembangan perhutanan sosial maupun pemberdayaan masyarakat hingga saat ini. Kembali, akan mudah diduga apabila persoalannya dibalik, bukan masuk kepada relung-relung karakteristik hutan secara detail, tetapi hutan harus dilihat sebagai bagian dari DAS atau ekoregion yang lebih luas, maka pada posisi ini juga belum terfikirkan jenis ilmu pengetahuan apa yang perlu digunakan untuk menafsirkan hutan sebagai bagian dari bentang alam itu.

Terhadap isi buku yang tertuang dalam tiga bagian di atas, pada ujungnya dilakukan pemikiran reflektif untuk memosisikan ilmu pengetahuan dan praktek kehutanan saat ini dan di masa depan. Bagian akhir yang ditulis oleh Dudung Darusman dan Hariadi Kartodihardjo ini memberikan perhatian yang ditujukan pada ilmu pengetahuan dan keunggulan bangsa, peran dan tugas ilmuwan, doktrin yang ditimbulkan ilmu pengetahuan (*scientific forestry*), kekuasaan yang membonceng ilmu pengetahuan itu, dampak buruk bagi praktek kehutanan, perluasan ilmu pengetahuan itu sendiri untuk dapat memandang persoalan

menjadi lebih sesuai dengan kenyataan yang dihadapi, maupun menggalai tipe-tipe ilmuwan seperti apa yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Dengan demikian, buku berjudul “Kembali ke Jalan Lurus:....” ini sama-sekali tidak memaknai arti “lurus” secara fisik, melainkan suatu abstraksi agar dapat menghindari jalan berliku yang berkepanjangan untuk mengatasi persoalan-persoalan kehutanan. Modal utama untuk dapat mencapai jalan lurus itu bukan melalui materi atau kekuasaan, melainkan pembaruan kerangka berfikir melalui perluasan ilmu pengetahuan kehutanan yang digunakan selama ini.

Ucapan Terimakasih

Kepada ke-lima belas penulis sebagai teman, sahabat, dan guru saya, diucapkan terimakasih atas sumbangan pemikiran di dalam buku ini, serta secara khusus juga disampaikan kepada pembahas: Bapak-bapak Herman Haeruman, Nana Suparna, dan Mubariq Ahmad. Kepada Panitia Hari Pulang Kampus Alumni Fakultas Kehutanan ke XV-2012, Institut Pertanian Bogor serta Epistema Institute diucapkan terimakasih atas disediakannya ruang, waktu dan sumberdaya untuk membahas maupun menerbitkan buku ini.

Bogor, Januari 2013

Editor dan Penulis,
Hariadi Kartodihardjo

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	xi
Bagian I:	
Peran dan Perluasan Ilmu Pengetahuan Kehutanan	
Pengantar Bagian I: Hegemoni Ilmu Pengetahuan— <i>Hariadi Kartodihardjo</i>	3
Keniscayaan Transdisiplinaritas dalam Studi Sosio- Legal terhadap Hutan, Hukum, dan Masyarakat— <i>Myrna A Safitri</i>	9
Matinya Ilmu Kehutanan: Sebuah Esai Pendahu- luan— <i>Hardjanto</i>	21
Scientific Forestry: Sebuah Gugatan— <i>Sudarsono Soedomo</i>	49
Menggugat Ilmu Pengetahuan Kehutanan dan Eko- nomi Politik Pembangunan Kehutanan Indonesia— <i>San Afri Awang</i>	79
Menafsir Kebijakan Berujung Hegemoni Kekuasaan: Sebuah Telaah Diskursus— <i>Azis Khan</i>	99

Bagian II:

Peran Institusi dan Politik dalam Analisis Kebijakan Kehutanan

Pengantar Bagian II: Pendekatan Institusi dan Politik— <i>Hariadi Kartodihardjo</i>	141
Kepemerintahan dan Kebijakan Kehutanan: Peran Aktor, Kepentingan dan Diskursus Peraturan sebagai Alat Pemaksa— <i>Hariadi Kartodihardjo</i>	149
Reforma Institusi dan Tata Kepemerintahan: Faktor Pemungkin Menuju Tata Kelola Kehutanan yang Baik— <i>Bramasto Nugroho</i>	177
Institusi dalam Perspektif Teori Permainan— <i>Sudarsono Soedomo</i>	225
Kontestasi Devolusi: Ekologi Politik Pengelolaan Hutan Berbasis Komunitas— <i>Soeryo Adiwibowo, Mohamad Shohibuddin, Hariadi Kartodihardjo</i>	255
Desentralisasi Pengelolaan Hutan Lindung: Proses Pembuatan dan Implementasi Kebijakan— <i>Sulistya Ekawati</i>	309

Bagian III:

Reforma Kebijakan Ekonomi, Sosial dan Pengelolaan Hutan Berbasis Ekoregion

Pengantar Bagian III: Integrasi Pendayagunaan Modal Ekonomi, Sosial dan Ekologi— <i>Hariadi Kartodihardjo</i>	325
Kesalahan Makna, Kesalahan Kebijakan: Review Konsep Kelestarian Tegakan Hutan, Dana Reboisasi dan PNBPN dari Penggunaan Kawasan Hutan— <i>Sofyan P Warsito</i>	333
Pengembangan Desa Konservasi Hutan Keanekaragaman Hayati— <i>Ervizal A.M. Zuhud</i>	357
Membawa Perhutanan Sosial Indonesia ke Upaya yang Lebih Menjanjikan— <i>Mustofa Agung Sardjono</i>	397
Reforma Agraria di Sektor Kehutanan: Mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari, Keadilan Sosial dan Kemakmuran Bangsa— <i>Didik Suharjito</i>	423

Ekoregion, Bioregion dan Daerah Aliran Sungai dalam Pembangunan Nasional Berkelanjutan— <i>Hendrayanto</i>	451
Bagian IV:	
Penutup—Implikasi Kebijakan	
Penggunaan Ilmu Pengetahuan Kehutanan: Refleksi dan Evaluasi— <i>Dudung Darusman</i>	465
Masalah Cara Pikir dan Praktek Kehutanan: Refleksi dan Evaluasi— <i>Hariadi Kartodihardjo</i>	477
Profil Penulis	499

Pengantar Bagian 1

Hegemoni Ilmu Pengetahuan

Hariadi Kartodihardjo

*Kesalahan tidak menjadi kebenaran
karena propaganda berulang-ulang,
kebenaran tidak menjadi kesalahan
karena tidak ada yang melihatnya.
Mahatma Gandhi.*

Perjalanan pembangunan kehutanan, kebijakan dan praktek-prakteknya sudah cukup jauh. Berbagai kondisi, kejadian atau peristiwa telah diungkapkan oleh media maupun diteliti atau diperbincangkan dalam seminar-seminar, namun salah satu hal penting yang belum pernah difikirkan secara mendalam adalah tentang peran penguasaan ilmu pengetahuan dan substansi ilmu kehutanan, terhadap benar-salah, baik-buruk atau maju-mundurinya pembangunan kehutanan. Penguasaan ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah bagaimana ilmu pengetahuan secara luas—setidaknya terkait dengan teknis dan manajemen, ekonomi, sosial, hukum, kelembagaan, politik—dikuasai dan di-dayagunakan sebagai dasar penetapan masalah maupun solusinya.

Pepatah yang menyatakan “Ilmu adalah pelita kehidupan” atau pendapat Einstein yang cukup populer, bahwa “Ilmu tanpa agama adalah lumpuh dan agama tanpa ilmu adalah buta” menegaskan betapa pentingnya ilmu pengetahuan itu sebagai kehidupan umat manusia.

Mungkin karena citra ilmu pengetahuan yang sudah sedemikian tingginya, maka kritik terhadap penggunaan ilmu pengetahuan belum banyak menjadi agenda yang secara sungguh-sungguh dilaksanakan.

Lemahnya Kritik Ilmu Pengetahuan

Dikaitkan dengan pembangunan kehutanan di atas, diperkirakan ada beberapa alasan mengapa penguasaan ilmu pengetahuan dan substansi ilmu kehutanan yang melahirkan pengelolaan hutan ilmiah (*scientific forestry*), belum pernah dianggap sebagai faktor yang menentukan baik-buruknya kinerja pembangunan kehutanan, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Pertama, adanya anggapan bahwa ilmu pengetahuan adalah netral. Pemikiran itu relatif mendominasi para rimbawan Indonesia. Hal ini diperkirakan karena rimbawan pada umumnya berangkat dari kebiasaan pemahaman terhadap ilmu-ilmu alam dengan hukum-hukum alam yang kongkrit dan baku. Fakta dianggap tidak dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh orang atau kelompok orang yang berbeda, sebaliknya harus diinterpretasikan secara seragam oleh siapapun orangnya sesuai kondisi fisik yang ada, untuk mendapatkan ukuran-ukuran yang dianggap sebagai "obyektif" dan "benar". Misalnya penggunaan teknologi untuk menebang pohon atau pengaturan jenis dan jarak tanam dalam membangun hutan harus dikatakan baik dan benar apabila teknologi pemanenan dan pengaturan penanaman itu terbukti memberi hasil terbaiknya, yaitu sesuai dengan kondisi alam yang harus dipertimbangkan. Maka, ilmu pengetahuan yang menghasilkan teknologi pemanenan dan pengaturan penanaman itu obyektif dan terbebas dari subyektifitas pembuatnya. Sampai di sini, maka tidak perlu ada pertanyaan mengenai ilmu pengetahuan sebagai sumber masalah.

Dalam kenyataannya, dapat terjadi jauh berbeda dengan apa yang diharapkan. Teknologi pemanenan pohon-pohon besar dengan menggunakan traktor ukuran besar dan segenap peralatan lainnya yang mahal harganya hanya dapat dibeli oleh orang-orang tertentu yang mempunyai kekayaan jauh lebih besar daripada kekayaan rata-rata yang dimiliki masyarakat luas. Demikian pula, jenis pohon dan jarak tanam menentukan siapa yang akan memanfaatkan dan untuk apa, serta membatasi ruang bagi tanaman lain yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Dalam hal ini, maka ilmu pengetahuan yang dipergunakan untuk menentukan teknologi pemanenan dan pengaturan penanaman

menjadi subyektif. Setidaknya dalam hal ini hanya memberi kesempatan bagi sekelompok orang tertentu dan sama-sekali menutup kesempatan bagi sekelompok orang lainnya.

Kedua, ilmu pengetahuan yang telah diwujudkan dalam bentuk “narasi kebijakan” bukan hanya tidak netral, namun secara sengaja dapat digunakan sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan individu atau kelompok. Narasi kebijakan dapat berupa cerita, naskah atau pernyataan, namun bukan sekedar berasal dari pembicaraan atau pemikiran yang dituangkan dalam tulisan, melainkan suatu konstruksi persuasif atau suatu pernyataan yang disusun dan mengandung bujukan untuk maksud tertentu. Narasi kebijakan tersebut apabila dicermati secara teliti mengandung landasan awal pembentuknya seperti asumsi yang digunakan, pilihan isu, *framing* masalah, kemudian dikembangkan melalui serangkaian argumentasi, bukti pendukung, pembenaran, yang pada akhirnya menentukan apa yang harus dilakukan atau merekomendasi kebijakan apa yang harus dijalankan (Blaikie, et al, 2007).

Dengan demikian, maka ilmu pengetahuan—disamping peran yang sangat besar untuk mensejahterakan kehidupan manusia—dapat digunakan sebagai dasar ditetapkannya masalah-masalah dan solusi-solusi serta segenap pedoman—yang kesemuanya itu oleh kebanyakan orang dianggap netral—padahal secara sistematis dapat dijadikan sebagai cara sangat efektif bagaimana kelompok-kelompok masyarakat tertentu dapat mempertahankan dominasinya terhadap kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Maka, sengaja atau tidak, ilmu pengetahuan yang membentuk narasi kebijakan tidak pernah dikritisi oleh para pemegang otoritas, sebaliknya dipertahankan sebagai alat untuk menguasai hak sekaligus akses terhadap sumberdaya, baik dalam bentuk sumberdaya alam, modal, tenaga kerja, informasi, sampai bentuk kekuasaan yang dapat mengalokasikan semua jenis sumberdaya tersebut (Ribot dan Peluso, 2003).

Ketiga, sumber ilmu pengetahuan dianggap demikian adanya, yang menjadi simbol lembaga-lembaga pendidikan tinggi dimana segenap masyarakat yang menyandang profesi tertentu dilahirkan. Para profesional seperti terhegemoni¹ untuk harus mengikuti ilmu pengeta-

1 Teori hegemoni dibangun atas anggapan pentingnya pengendalian pikiran atau ide sebagai alat pengendalian sosial politik, karena kekuatan fisik belaka tidak cukup. Hegemoni merupakan bentuk penguasaan satu kelompok atau beberapa kelompok atas kelompok lainnya, agar yang dikuasai mematuhi penguasa. Yang dikuasai tidak hanya merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma pengu-

huan apa adanya dan bahkan mungkin merasa melakukan semacam pengkhianatan apabila mempertanyakan ilmu pengetahuan sebagai sumber masalah. Ilmu layaknya kata orang seperti candu. Meskipun penyandu mengetahui daya rusaknya bagi tubuh tetapi tidak berdaya untuk meninggalkannya. Bahkan mungkin lebih dari sekedar candu, karena bukan hanya secara fisik sel-sel di dalam tubuh ikut menagih apabila pada waktunya tidak disediakan, melainkan—dalam konteks hegemoni itu—terdapat rasa berdosa apabila meninggalkannya.

Uraian di atas menggambarkan betapa hegemoni ilmu pengetahuan dapat menjadi pembatas untuk memikirkan kemungkinan lain tentang masalah-masalah dan solusi-solusi, selain yang sudah difikirkan dan ditentukan sebelumnya. Akibatnya tidak ada inovasi dalam menentukan masalah dan solusinya. Dalam hampir 20 tahun terakhir pembahasan mengenai masalah-masalah usaha kehutanan selalu terkait dengan masalah yang itu-itu juga seperti, konflik kawasan, illegal logging, hubungan pusat-daerah, dan ekonomi biaya tinggi. Ilmu kehutanan yang sudah terjabarkan di dalam peraturan-perundangan, prosedur kerja, pedoman melakukan kegiatan, dan lain-lain, bertahan atau sengaja dipertahankan oleh suatu kelompok atau suatu rejim untuk mempertahankan penguasaan atas kelompok lainnya atau mempertahankan keberadaan rejim itu, melalui hegemoni.

Keempat, terbatasnya penguasaan ilmu pengetahuan cenderung menyebabkan generalisasi penggunaan konsep tertentu untuk menyelesaikan masalah secara luas dan tidak dikaitkan dengan situasi dimana konsep itu digunakan. Hal itu serupa dengan memaksakan penggunaan konsep tertentu untuk memecahkan masalah, namun semua atau sebagian asumsi sebagai syarat berjalannya konsep itu, tidak terpenuhi, sementara itu tidak digunakan adanya konsep lain yang lebih tepat.

Ilmu pengetahuan bagi kelompok profesi tertentu dapat menjadi pembatas bagi profesi itu untuk memperluas pemahamannya mengenai ilmu pengetahuan lainnya. Bahkan bagi sekelompok orang tertentu, cenderung tidak beranggapan bahwa ilmu pengetahuan lain terkait erat dan berguna untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Dalam suatu perbincangan mengenai masalah-masalah kehutanan di

sa, namun lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Dengan begitu, hegemoni pada hakekatnya adalah upaya penguasa untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial-politik-ekonomi dengan cara pikir dan solusi yang sudah ditentukan (Gramsci, 1976)

lapangan, seseorang pernah menyatakan dengan nada mempertahankan atau menutup diri, bahwa: “*Apa yang terjadi di lapangan tidak ada teorinya*”. Pernyataan itu menunjukkan bahwa, di satu sisi, masalah di lapangan tidak terkait dengan ilmu yang difahaminya, namun meskipun demikian, tidak terdapat kesadaran bahwa selain ilmu yang difahaminya itu, ada ilmu lain yang mungkin berguna untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.

Dalam proses pembuatan kebijakan, sikap menutup diri tersebut menghasilkan kenyataan bahwa semakin banyak peraturan tidak menyebabkan persoalan semakin berkurang. Hal demikian itu disebabkan adanya dominasi pendekatan teknis dan administrasi serta hukum sebagai pendekatan utama ditetapkannya suatu kebijakan, sedangkan pendekatan sosial, ekonomi dan institusi maupun politik, hampir tertutup peluangnya untuk dapat digunakan. Akibatnya, peraturan berisi prosedur dan syarat administrasi yang memenuhi koridor hukum yang berlaku, namun isi peraturan tidak selalu sejalan dengan masalah sesungguhnya yang perlu dipecahkan. Dengan kata lain, peraturan menjawab masalah-masalah yang pada umumnya bukan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, yang semestinya mendapat solusi dengan adanya peraturan itu.

Kritik Reflektif

Pada Bagian I buku ini, diuraikan segenap kritik maupun masalah pelaksanaan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang mencakup telaah terhadap praktek-praktek pengelolaan hutan, penetapan kebijakan, ideologi, hegemoni dan diskursus maupun paradigma yang digunakan. Judul dan penulisnya adalah sebagai berikut:

1. Keniscayaan Transdisiplinaritas dalam sosio-legal terhadap hutan, hukum dan Masyarakat, oleh Myrna A Safitri
2. Matinya Ilmu Kehutanan: Sebuah esai pendahuluan, oleh Hardjanto
3. *Scientific Forestry*: Sebuah gugatan, oleh Sudarsono Soedomo
4. Menggugat Ilmu Pengetahuan Kehutanan dan Ekonomi Politik Pembangunan Kehutanan Indonesia, oleh San Afri Awang
5. Menafsir Kebijakan Berujung Hegemoni Kekuasaan: Sebuah telaah diskursus, oleh Azis Khan

Ide dan gagasan yang dituangkan dalam kelima tulisan di atas diharapkan dapat digunakan sebagai pengantar untuk secara mendalam memikirkan lebih lanjut pentingnya perbaikan kebijakan pembangunan kehutanan—khususnya melalui penyempurnaan paling mendasar—yaitu mempertanyakan kembali substansi dan penggunaan ilmu kehutanan yang digunakan dan mencari jawaban atas kegagalan atau pengabaian penggunaan segenap ilmu pengetahuan lain yang diperlukan.

Berbagai pendekatan teknokratis yang digunakan dalam penetapan kebijakan pembangunan kehutanan telah—disadari atau tidak—menurunkan kepekaan kebijakan itu terhadap rasa keadilan sosial ataupun kepekaan terhadap subyek pembangunan yang menjadi inti dan tujuan kebijakan. Di sisi lain, kekayaan sumberdaya hutan yang direduksi menjadi kayu tidak segera dapat diatasi dan diarahkan menuju kerangka pemikiran yang lebih utuh dalam menetapkan kebijakan kehutanan akibat berkembangnya arus utama perusahaan besar kehutanan yang memang hanya berorientasi pada kayu.

Sebagaimana dinyatakan dalam awal tulisan ini: "*Kesalahan tidak menjadi kebenaran karena propaganda berulang-ulang, kebenaran tidak menjadi kesalahan karena tidak ada yang melihatnya*". Kenyataan mengenai kesalahan dan kebenaran terhadap kerusakan maupun kelestarian hutan sudah secara jelas diketahui selama ini dan tidak lagi dapat dimanipulasi maupun dipungkiri. Mengubah kesalahan menjadi kebenaran sangat tergantung tindakan nyata dan tindakan nyata itu sudah dibuktikan tidak akan berubah apabila tidak diawali oleh perubahan kerangka pikir yang digunakan, artinya sangat tergantung pada ilmu pengetahuan yang difahami sebagai pembentuk kerangka pikir itu.

Pustaka

- Blaikie, P., Oliver Springate-Baginski, Ajit Banerjee, Binod Bhatta, Sushil Saigal dan Madhu Sarin. 2007. *Actors and their Narratives in Participatory Forest Management dalam Forest, People and Power: the Political Ecology of Reform in South Asia*, Oliver Springate-Baginski & Piers Blaikie (*Editor*). Eartscan. London. Hal 92- 115.
- Ribbot, C.J. dan Nancy Lee Peluso, 2003. *A Theory of Access*. *Rural Sociology* 68, 2; PA Research II Periodicals. Hal 153.